

## STRATEGI MATA PENCAHARIAN PEREMPUAN PESISIR DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERLANJUTAN EKONOMI RUMAH TANGGA DI DAERAH KEPULAUAN

### *Coastal Women's Livelihood Strategy In Maintaining Sustainability Household Economy In The Islands Region*

Terezia V. Pattimahu<sup>1\*</sup>, Jeane B. Nikijuluw<sup>2</sup>, Arsad Matdoan<sup>3</sup>, Korneles Sangur<sup>4</sup>, Martha Siahaan<sup>5</sup>, Lisy M. Liur<sup>6</sup>

Universitas Pattimura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ambon, Indonesia

\*e-mail Correspondence Author: [lency24.valency@gmail.com](mailto:lency24.valency@gmail.com)

#### Informasi Artikel

Publikasi Online: June 30, 2023

#### Kata Kunci

Strategi mata pencaharian;  
Perempuan pesisir; keberlanjutan  
ekonomi; Kepulauan

#### ABSTRAK

Keterlibatan perempuan pesisir dalam mempertahankan keberlanjutan kehidupan rumah tangga dilakukan dalam keterbatasan. Perempuan "dipaksa" untuk mencari alternatif tambahan pendapatan manakalah pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga yang cenderung meningkat dan bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi mata pencaharian perempuan pesisir serta mengidentifikasi kegiatan mata pencaharian paling dominan sebagai upaya untuk mempertahankan keberlanjutan ekonomi rumah tangganya. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini yang berlangsung pada bulan April 2023 hingga Agustus 2023 di Negeri Booi, Pulau Saparua, Maluku Tengah. Hasil penelitian menunjukkan jika perempuan pesisir berupaya untuk mempertahankan keberlanjutan ekonomi rumah tangganya melalui strategi mata pencaharian. Dimana, perempuan bukan saja melakoni satu mata pencaharian sebagai sumber pendapatannya akan tetapi lebih dari satu mata pencaharian. Strategi mata pencaharian ganda yang dilakukan perempuan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan pola tersebut perempuan dapat bertahan hidup bersama keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Walaupun demikian, hingga saat ini peran ganda perempuan pesisir dalam mempertahankan keberlanjutan kehidupan rumah tangganya masih terbatas akibat terbatasnya pengetahuan, ketrampilan, pola pikir maupun keterbatasan akses terhadap aset.

#### PENDAHULUAN

Kaum perempuan, selain diidentikkan sebagai tenaga kerja domestik yang hanya meliputi dapur, sumur dan kasur. Sehingga, perempuan dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Padahal, kenyataannya kaum perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dan penting terhadap keberlanjutan kehidupan rumah tangganya. Kondisi tersebut dapat terlihat pada aktifitas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat di daerah pedesaan terutama mereka yang tinggal dan

menetap pada kawasan pesisir. Strategi mata pencaharian masyarakat pedesaan sendiri telah menjadi isu menarik yang seringkali diperdebatkan berbagai kalangan (Dehghani, 2018; Ian, 2009; Pomeroy et al., 2017; Wang et al., 2015). Begitu pula halnya dengan mata pencaharian masyarakat pesisir (Lawless et al., 2019; Muhammad & Hahury, 2022; Roy & Basu, 2020; Sarmin et al., 2017). Isu ini makin menarik dengan kecenderungan orientasi berbagai kalangan yang berpendangan bahwa, masyarakat yang tinggal dan bermukim pada wilayah pesisir akan bermata pencaharian sebagai nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup rumahtangganya.

Padahal tidak selamanya masyarakat yang bermukim pada daerah pesisir akan bermata pencaharian dari sektor perikanan dan bekerja sebagai nelayan. Akan tetapi sebaliknya, justru bersumber dari sektor lain misalnya, perkebunan, pariwisata atau sektor lainnya (Azis & Hermi, 2021; Hahury & Soselisa, 2021). Apalagi, kajian-kajian tersebut lebih memusatkan perhatiannya pada peran kaum laki-laki sebagai sumber utama dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga pesisir. Padahal, kaum perempuan pada wilayah pesisir juga memiliki potensi sebagai sumber alternatif pendapatan baru bagi rumah tangga mereka (Fröcklin et al., 2018). Pendapat ini menyiratkan jika strategi mata pencaharian dipandang sebagai kegiatan yang dipilih orang atau komunitas agar dapat mencapai tujuan penghidupan mereka melalui ketersediaan sumber daya dan kondisi kerentanan yang dihadapi (Dehghani et al., 2018).

Strategi penghidupan (*livelihood strategy*) berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola dan mengkombinasikan aset penghidupan yang tersedia, mensikapi perubahan yang terjadi serta menentukan prioritas untuk mempertahankan atau memperbaiki penghidupan (Ian, 2009). Lebih jauh, Scoones mengelompokan strategi penghidupan ini ke dalam tiga kelompok antara lain; rekayasa sumber nafkah pertanian, pola nafkah ganda dan rekayasa spasial dengan mengkombinasikan aset-aset penghidupan (modal alam, modal fisik, modal keuangan, modal sosial). Nugroho et al (2018) dalam penelitiannya tentang strategi penghidupan masyarakat desa, menunjukkan bahwa, masyarakat desa Kucur memiliki lima aset penghidupan (aset alam, aset fisik, aset finansial, aset manusia dan aset sosial budaya). Sementara itu Frank (2007), meneliti tentang *Household strategies and rural livelihood diversification* menggambarkan upaya diversifikasi mata pencaharian rumahtangga pedesaan sebagai sebuah proses rumahtangga pedesaan membangun keragaman kegiatan dan kemampuan untuk bertahan hidup dan meningkatkan standar hidup mereka. Sedangkan, Paudel et al (2017), memperlihatkan bahwa, mayoritas rumah tangga pedesaan di Nepal tengah memilih untuk mendiversifikasikan pendapatannya ke sumber non-pertanian sebagai strategi penghidupannya.

Negeri (desa) Booi, Pulau Saparua, Maluku Tengah merupakan salah satu Negeri adat yang masih eksis hingga saat ini. Negeri Booi sendiri terletak pada daerah pesisir dengan sumber penghidupannya justru berasal dari sektor perkebunan berupa tanaman pala (*Myristica fragrants*) yang menjadi tanaman perkebunan mayoritas sekaligus sumber utama pendapatan rumah tangganya. Tanaman pala di Negeri Booi merupakan tanaman warisan dari generasi ke generasi dan menjadi milik keluarga besar (klan/mata rumah) berdasarkan garis keturunan ayah atau laki-laki (*patrilinealistic*). Sistem kepemilikan seperti ini menjadikan kaum perempuan di Negeri Booi menjadi rentan kehilangan sumber mata pencaharian manaklah mereka telah menikah. Hal ini disebabkan karena aturan kepemilikan dusun/dusung secara adat mengharuskan kaum perempuan Negeri Booi mengembalikan hak pengelolaan Dusun/dusung (kebun)-nya kepada keluarga besar setelah menikah.

Menyadari kerentanann tersebut, maka ada konvensi di dalam masyarakat Negeri Booi tersebut yang tetap membiarkan kaum perempuan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam setiap dusun/dusung milik masyarakat Negeri Booi. Selain konvensi tersebut, kaum perempuan Negeri Booi juga berupaya memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya melalui aktifitas di luar sektor perkebunan. Kajian Sharaunga & Mudhara (2021), mengidentifikasi strategi penghidupan perempuan pedesaan yang penting dalam mengurangi kemiskinan rumah tangga di Msinga, Afrika Selatan. Ditemukan bahwa mata pencaharian perempuan tertentu, selain modal dan faktor sosio-ekonomi lainnya, sangat penting untuk mengeluarkan rumah tangga mereka dari kemiskinan. Kondisi berbeda diungkapkan oleh Yuying et al (2018), dilakukan pengujian apakah komposisi gender migran dari rumah tangga pedesaan mempengaruhi strategi ekonomi rumah tangga dan produktivitas pertanian, yang merupakan aktivitas ekonomi mendasar bagi masyarakat pedesaan di Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang mempunyai migran kemungkinan lebih kecil untuk terlibat dalam kegiatan pertanian atau menjalankan usaha kecil dibandingkan rumah tangga yang tidak

mempunyai migran. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mungkin harus memikul beban pekerjaan di bidang pertanian ketika laki-laki bermigrasi, sedangkan kehadiran migran laki-laki dalam rumah tangga menghambat rumah tangga untuk melakukan kegiatan non-pertanian lokal.

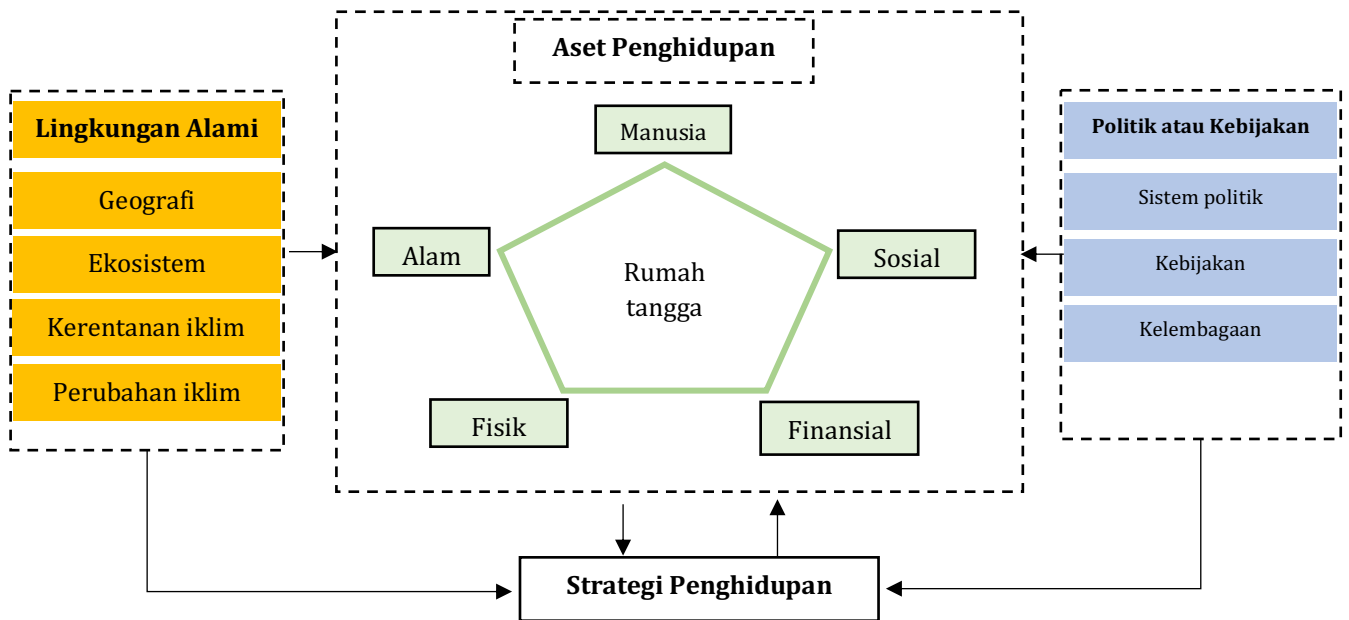
Studi selanjutnya menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan perempuan pedesaan setelah berpartisipasi dalam pertanian skala kecil, kontribusi mereka terhadap rumah tangga, serta status keberdayaan mereka. Penelitian ini dilakukan di Jinaigati upazila distrik Sherpur di Bangladesh dengan 80 responden (perempuan) yang dipilih secara purposif menggunakan simple random sampling. Alat analisis kuantitatif mencakup berbagai statistik deskriptif, analisis fungsional, koefisien regresi berganda yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan perempuan melalui usahatani skala kecil. Variabel tingkat pendidikan perempuan, sumber pendapatan lain, pengalaman dan pelatihan, akses terhadap kredit, kemampuan mengambil keputusan berdampak positif terhadap pendapatan perempuan pedesaan. Dari Indeks Konfrontasi Masalah, ditemukan bahwa kekurangan modal merupakan masalah peringkat pertama, pelatihan berbasis kebutuhan pada peringkat kedua, suku bunga tinggi pada peringkat ketiga, kurangnya ukuran lahan pada peringkat keempat, dan rendahnya kualitas benih merupakan masalah peringkat kelima. Pendapatan mereka dari hal ini membawa perubahan positif yang luar biasa dalam hidupnya dan mereka memiliki kendali yang lebih baik atas keputusan dan pendapatan mereka. Yang terakhir, partisipasi aktif perempuan dalam bidang ekonomi dalam pertanian skala kecil membantu mereka mengatasi prasangka, hambatan sosio-ekonomi, dan pencapaian pemberdayaan tertinggi dalam konteks Bangladesh dan, jika pemerintah mengambil inisiatif yang tepat dalam hal kebijakan gender, maka pendapatan perempuan di pedesaan akan meningkat dan status penghidupan akan meningkat secara signifikan (Kabir et al., 2019).

Penelusuran berbagai studi sebelumnya memperlihatkan bahwa, strategi mata pencaharian yang ditempuh perempuan pedesaan pesisir merupakan respon atas kerentanan yang dihadapi. Umumnya, berbagai penelitian tersebut menemukan adanya strategi penghidupan perempuan pedesaan Sharaunga & Mudhara (2021), dampak komposisi gender migran terhadap strategi ekonomi rumah tangga, produktivitas pertanian masyarakat pedesaan Yuying et al (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan perempuan pedesaan (Kabir et al., 2019), Keterbatasan perempuan dalam menenun pilihan mata pencaharian (Lawless et al., 2019). Sementara kajian yang memperlihatkan strategi mata pencaharian perempuan pesisir yang bersumber dari sektor perkebunan masih sedikit yang melakukannya terlebih berkaitan dengan kontribusi perempuan pesisir di Maluku. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi mata pencaharian perempuan pesisir serta mengidentifikasi kegiatan mata pencaharian paling dominan sebagai upaya untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Dengan demikian, maka penelitian ini dapat berkontribusi terhadap gender, pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan wilayah pedesaan maupun topik penghidupan berkelanjutan.

## **METODE**

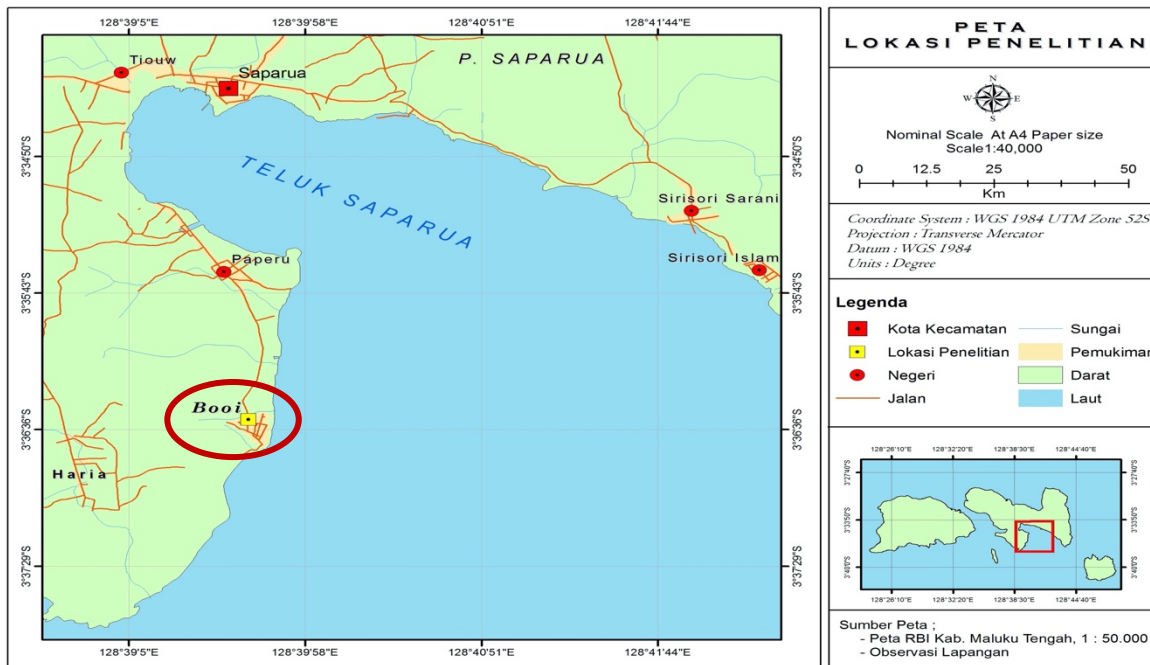
Untuk memahami strategi yang digunakan perempuan pesisir sebagai mata pencahariannya dengan memanfaatkan aset yang ada, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penggunaan metode kualitatif karena dianggap relevan dalam menggambarkan (deskriptif) pemahaman terkait strategi mata pencaharian perempuan pesisir dalam mempertahankan keberlanjutan ekonomi rumah tangga di daerah kepulauan sehingga penulis memiliki ruang untuk memberikan interpretasi atas fakta-fakta empiris. Sementara pendekatan fenomenologi merupakan tradisi dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pengalaman hidup manusia (Almanshur & Ghani, 2012). Dimana, pengalaman hidup digunakan sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang aspek sosial budaya, ekonomi, politik bahkan konteks sejarah dimana pengalaman tersebut terjadi.

Mata pencaharian mengacu pada kegiatan keluarga untuk memperoleh kebutuhan dasar agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga (Cai, 2012), sehingga penelitian ini mempertimbangkan konsep aset mata pencaharian yang dikemukakan oleh Chambers & Conway (1992) yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Aset Mata Pencaharian Chambers & Conway (1992)

Penelitian ini berlangsung dari bulan April 2023 hingga Agustus 2023 di Negeri Booi, pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku. Peta lokasi penelitian tersaji dibawah ini.



Gambar 2. Lokasi penelitian, 2023

Selanjutnya data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan perempuan komunitas Negeri Booi dan pemilik dusung pala sebagai informan kunci yang berjumlah 20 orang. Sementara pemerintah Negeri Booi (Raja dan Saniri Negeri) digunakan sebagai informan dengan karakteristik khusus yang sekaligus merupakan triangulasi sumber yang berfungsi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data agar data menjadi kredibel dan valid.

Setelah data terkumpul melalui wawancara dan observasi, maka dilakukan analisis data dengan tahapan yang dikemukakan oleh John (2016), antara lain: Pertama, mengorganisir dan menyiapkan data yang akan dianalisis. Pada tahap ini semua data diorganisir berdasarkan tanggal pengumpulan, sumber data,

jenis dan deskripsi data. Kedua, Membuat koding terhadap data-data. Tahap ini merupakan proses memberi tanda terhadap data yang telah dikelompokkan. Data yang sejenis diberi kode yang sama. Ketiga, menghubungkan antar tema. Setelah membuat katagori data yang disusun dalam tema-tema penelitian, maka penulis menarik hubungan antar tema satu dengan yang lain. Keempat, Interpretasi data dilakukan agar data yang diperoleh mudah untuk dipahami.

## HASIL DAN DISKUSI

### Ragam aset mata pencaharian masyarakat *Negeri Booi*

Aktifitas pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga masyarakat *Negeri Booi* tidak jauh berbeda dengan aktifitas pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat pedesaan pada umumnya. Dimana, pemenuhan kebutuhan hidup masih sangat bergantung pada hasil-hasil alam, baik di darat maupun laut. Bahkan, pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga ini pun masih mengandalkan laki-laki sebagai sumber utama pendapatan rumah tangga. Kebutuhan hidup masyarakat di daerah pedesaan sangat bervariasi dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi inilah yang seringkali memaksa masyarakat pedesaan untuk mencari alternatif sumber pendapatan lainnya. Apalagi pendapatan yang bersumber dari hasil alam seringkali tidak pasti hasilnya. Temuan empirik dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa, masyarakat *Negeri Booi* memiliki sumber utama pendapatan rumah tangga berupa hasil perkebunan tanaman pala. Disamping itu juga terdapat beberapa tanaman perkebunan yang dijadikan sebagai sumber pendapatan, seperti kenari, pisang, ubi-ubian, cengkih dan sebagainya.

Temuan empirik juga menunjukkan jika masyarakat *Negeri Booi* dapat mengakses semua sumber daya alam yang dimiliki sekalipun sumber daya alam tersebut bukanlah milik keluarga besar (klan/matarumah). Selama sumber daya alam tersebut masih berada dalam petuanan (wilayah ulayat) *Negeri Booi*, maka masyarakat dapat mengaksesnya. Dalam konteks ini, penulis berusaha memberi gambaran terkait kepemilikan berbagai aset penghidupan sebagai mata pencaharian yang dimiliki masyarakat *Negeri Booi*. Bertolak dari pandangan Chambers & Conway (1992) dan (Ellis, 1999) yang menyebutkan bahwa masyarakat di daerah pedesaan memiliki beragam aset yang dapat dimanfaatkan oleh individu, rumah tangga atau komunitas sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Ellis (2000) yang berpendapat bahwa, aset penghidupan biasanya dikategorikan ke dalam aset alam, fisik, ekonomi dan modal sosial dan aset-aset ini dimediasi oleh keberadaan institusi dan struktur organisasi. Dalam kajian ini akan menyajikan aset-aset penghidupan masyarakat *Negeri Booi* yang mengacu pada lima aset penghidupan antara lain, modal sosial, manusia, alam, finansial dan fisik (Chambers & Conway, 1992)

**Aset alam**, Aksebilitas masyarakat pedesaan terhadap sumber daya alam memainkan peran penting dan startegis terkait keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pedesaan terutama kaum perempuan. Bagi masyarakat pesisir, sumber utama mata pencaharian mereka berasal dari sektor perikanan dengan berbagai ragam produknya (Jaiteh et al., 2017; Monagail et al., 2017). Sementara dalam konteks masyarakat *Negeri Booi* yang bermukim pada pada pesisir justru sumber utama mata pencaharian mereka bukan berasal dari sektor perikanan namun dari sektor perkebunan. Aktifitas sebagai nelayan cenderung hanya sebagai “pelengkap” kebutuhan konsumsi rumahtangga semata dan bukan sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Biasanya, hasil laut yang diperoleh akan dijual kepada sesama anggota masyarakat *Negeri Booi* jika terdapat kelebihan hasil tangkap. Temuan empirik menemukan jika aktifitas produksi dengan memanfaatkan potensi hasil laut sangat bergantung pada kebutuhan rumah tangganya. Jika menyangkut kebutuhan konsumsi sehari-hari, maka biasanya masyarakat *Negeri Booi* akan memancing atau menyala ikan. Selain itu, masyarakat *Negeri Booi* juga memiliki tradisi dalam memanfaatkan potensi laut, yaitu turun bameti dan balobe.

Tradisi *turun bameti* dilakukan masyarakat *Negeri Booi*, khususnya kaum perempuan pada saat air laut sedang surut atau meti. Tradisi ini berupa aktifitas memungut bia (kerang-kerangan/gleaning shellfish) dan udang yang dilakukan pada saat bulan gelap. Tradisi *turun bameti* hanya mengandalkan tangkapan dengan tangan sehingga tidak membutuhkan keahlian khusus. Tradisi ini lebih banyak dilakukan bersama-sama dengan keluarga besar atau klan. Sedangkan tradisi *balobe* dilakukan masyarakat *Negeri Booi* pada malam hari. Tradisi *balobe* sangat berbeda dengan tradisi *turun bameti*. Tradisi balobe umumnya dilakukan kaum laki-laki *Negeri Booi* untuk mencari hasil laut yang mengandalkan alat penangkap berupa parang dan kalawai (tombak yang bagian ujungnya bermata tiga). Aktifitas *balobe* dilakukan pada saat malam hari dengan hasil berupa ikan, lobster dan gurita. Namun seiring



perkembangan jaman dan permintaan yang cukup tinggi, maka hasil-hasil tangkapan tersebut terkadang juga dijual untuk menambah pendapatan rumahtangga mereka bahkan terkadang mereka juga mengambil teripang untuk dijual. Kondisi inilah yang menyebabkan masih banyak terdapat biota laut dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Apalagi daerah perairan di Negeri Booi masih sangat terawat dengan baik. Namun sangat disayangkan bahwa, sekalipun masyarakat Negeri Booi tinggal dan bermukim di daerah pesisir pantai akan tetapi sumber mata pencahariannya bukan berasal dari hasil laut.

Mata pencaharian utama masyarakat Negeri Booi bersumber dari tanaman pala (biji dan bunga pala), luas areal perkebunan pala yang dimiliki sebesar 13 hektar dari 31,4 hektar total luas tanaman perkebunan masyarakat Negeri Booi. Sedangkan rata-rata kepemilikan dusung (kebun) masyarakat Negeri Booi antara 0,5 hektar-2,5 hektar. Sementara umur tanaman pala sendiri dapat mencapai 100 tahun. Bagimasyarakat Negeri Booi, tanaman pala merupakan "harta kekal". Pandangan ini mengisyaratkan bahwa, selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tanaman pala juga dapat dipanen sebanyak 3-4 kali dalam setahun. Sehingga kebutuhan hidup rumahtanggamasyarakat ini sepanjang tahun dapat dipenuhi. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat Negeri Booi sangat bergantung pada ketersediaan dan akses terhadap tanaman pala (Kakerissa & Hahury, 2018). Apalagi sejarah membuktikan bahwa, tanaman pala bersama cengkik merupakan komoditi yang menyebabkan Maluku dikenal oleh dunia, jauh sebelum Negara Indonesia ini ada.

Terkait ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap sumber daya alam Barbier (2015), Blythe (2015) dan Fischer (2018) memiliki pandangan yang sama bahwa, ketergantungan masyarakat pedesaan, terutama masyarakat di daerah pesisir terhadap sumber daya alam begitu tinggi akan tetapi ketergantungan ini juga memiliki kerentanan yang dapat mengancam penghidupan mereka sendiri akibat faktor alam, misalnya perubahan ekosistem dan perubahan iklim. Dengan kata lain aset alam memang memiliki pengaruh terhadap penghidupan masyarakat pesisir termasuk kaum perempuan akan tetapi aset alam juga memiliki resiko yang tinggi terhadap keberlanjutan mata pencaharian di daerah pesisir itu sendiri (Baffoe & Matsuda, 2018; Kuang et al., 2020). Pandangan ini ingin mempertegaskan bahwa, tidak selamanya masyarakat yang tinggal dan dekat dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dapat sejahtera. Walaupun demikian, usaha untuk mempertahankan keberlanjutan penghidupan rumah tangganya terus mereka upayakan. Temuan empirik dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa, masyarakat Negeri Booi belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait pengelolaan hasil laut. Selama ini komoditi perikanan hanya dimanfaatkan sebatas subsisten semata dan bukan sebagai komoditi yang memiliki nilai komersil yang cukup tinggi bagi pendapatan rumah tangganya. Berikut ini merupakan gambaran aset penghidupan perempuan di *Negeri Booi*:

**Aset manusia**, dalam mata pencaharian sangat penting sebagai pengambil keputusan terhadap strategi apa yang akan digunakan rumah tangga agar penghidupannya dapat terus berkelanjutan. Aset manusia ini dapat merujuk pada seberapa besar tenaga kerja yang digunakan maupun kualitas pengetahuan, ketrampilan serta kemampuan untuk bekerja. Untuk itu, aset manusia dapat diartikan sebagai kompetensi, pengetahuan dan atribut pribadi yang disatukan melalui ketrampilan dalam menghasilkan nilai ekonomi (Ian, 2009; Singgalen et al., 2019). Pengetahuan dan ketrampilan yang rendah dapat menyebabkan aset manusia berada pada posisi tawar yang rendah pula sehingga dari sisi kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan pekerjaan dengan balas jasa atau upah juga akan rendah. Tentunya kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya masyarakat daerah pesisir dalam mempertahankan penghidupan mereka sendiri. Apalagi terdapat perbedaan pendapatan atau ketimpangan pendapatan antara masyarakat di daerah pesisir dengan masyarakat di daerah lainnya yang memicu peningkatan kemiskinan.

Masalah ketimpangan dalam pendapatan merupakan permasalahan yang bukan saja dihadapi negara-negara sedang berkembang akan tetapi turut pula dialami negara maju. Demikian halnya juga dengan ketimpangan pendapatan antar daerah, kelompok masyarakat maupun antar gender (laki-laki dan perempuan). Terkait kesenjangan distribusi pendapatan antar gender, Tijdens & Klaveren (2012), mengungkapkan bahwa kesenjangan penghasilan antar gender di Indonesia adalah sebesar 13,7 persen. Dimana penghasilan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan (Damayant, 2018; Karin & Myriam, 2016). Senada dengan hal tersebut, Silingiene & Radvila (2014) menyatakan bahwa, dalam permasalahan perekonomian suatu negara dan kehidupan sosial, masalah diferensiasi upah karena

perbedaan gender merupakan persoalan serius yang perlu untuk dievaluasi. Sementara itu Mardiana (2015), dalam kajiannya mempertegaskan jika rendahnya penghasilan perempuan dari pada laki-laki di Indonesia tidak terlepas dari budaya patriarki yang sering kali tidak menguntungkan bagi perempuan.

Peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga membuat partisipasi perempuan di pasar kerja tidaklah sebesar partisipasi laki-laki. Bahkan, sekalipun perempuan tersebut bekerja, maka pendapatannya tidak akan sebesar laki-laki. Dapat dikatakan, tenaga kerja perempuan seringkali dibayar dengan harga murah (Anker, 1998). Hal ini menandakan bahwa dengan semakin melebarnya gap (kesenjangan) pendapatan, maka akan menyebabkan semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan dan akan berdampak pada terjadinya disparitas pendapatan (Damanik et al., 2018). Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan bukan saja dapat menyebabkan gangguan terhadap proses pembangunan pada suatu wilayah akan tetapi dapat menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban seperti pencurian, perampokan dan sebagainya.

Dalam konteks masyarakat Negeri Booi, aset manusia dapat tergambar melalui pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan serta pelibatan tenaga kerja dari keluarga inti maupun pelibatan tetangga. Temuan empirik dalam penelitian ini juga memperlihatkan adanya pelibatan anak-anak sebagai sumber alternatif pendapatan rumah tangga mereka. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di Negeri Booi lebih berfokus pada pekerjaan yang sifatnya banyak menggunakan fisik (tenaga) dan pekerjaan yang sifatnya "manejerial" (mengatur) atau tidak membutuhkan tenaga yang besar. Umumnya pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang besar akan dilakukan oleh laki-laki, misalnya *balobe* (mencari ikan pada malam hari), *paruru* (memanen sisa buah pala). Sedangkan kegiatan yang dilakukan perempuan, misalnya, *turun bameti* (mencari kerang-kerang kecil/bia dan udang pada saat air laut surut/meti), *bacakar/bapilih* biji pala, membela buah pala. Disamping berbagai aktifitas produksi tersebut, para perempuan Negeri Booi juga memiliki peran dalam mengelola keuangan rumah tangga, seperti menyimpan uang di bank, mengatur belanja rumah tangga dan sebagainya.

Sementara pelibatan tetangga sebagai tenaga kerja dalam aktifitas produksi lebih banyak digunakan saat memasuki musim panen buah pala. Aktifitas memanen buah pala dapat dilakukan sebanyak 3-4 kali dalam setahun. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pelibatan tetangga dalam proses panen pada waktu yang lampau sama sekali tidak memerlukan biaya tenaga kerja seperti sekarang ini. Bagi masyarakat Negeri Booi, mereka cukup menyampaikan keinginan untuk meminta bantuan kepada tetangga saja dan para tetangga ini dengan sukarela membantu proses panen tersebut. Dalam masyarakat Negeri Booi khususnya dan masyarakat Maluku secara umumnya, permintaan bantuan ini lebih dikenal dengan sebutan *masohi* (bekerja bersama-sama tanpa dibayar).

**Aset modal sosial**, seringkali dipahami hanya sebatas uang atau harta kekayaan, padahal modal sosial memiliki arti kiasan sebagai aset atau modal nyata dalam kehidupan masyarakat. Syahra (2003) yang berpendapat bahwa, konsep modal sosial merupakan pemikiran anggota masyarakat bahwa, mereka tidak mungkin secara individu dapat mengatasi berbagai masalah yang muncul sehingga diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik untuk mengatasi persoalan yang muncul tersebut. Dalam pembangunan suatu daerah, modal sosial memainkan peran penting dan strategis yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Hal ini disebabkan karena modal sosial dalam paradigma pembangunan memiliki sifat bottom up ketimbang top down yang mencoba mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan itu sendiri (Rusy & Fathy, 2019). Bahkan Field (2010) menyatakan bahwa, gagasan utama modal sosial berbicara terkait ikatan atau kohesi sosial yang digunakan untuk mendorong iklim kerjasama agar memperoleh manfaat. Hubungan kerjasama ini diatur oleh pola interelasi yang resiprositi dan saling menguntungkan, berdasarkan nilai dan norma yang berlaku serta dibangun oleh pondasi kepercayaan (Maryam, 2012).

Sementara dalam konteks komunitas adat Negeri Booi, modal sosial di dorong oleh keberadaan sebagai sesama anggota Negeri Booi (ana adat negeri Samahu Amalatu) dalam memenuhi kebutuhan hidup rumahtangga mereka. Modal sosial sebagai ana adat Samahu Amalatu menciptakan jaringan kepercayaan berbasis pada norma dan nilai yang terwujud kearifan lokal berupa tradisi memungut biji pala (bapilih biji pala) di setiap kebun (dusung) dalam wilayah adat (petuanan) Negeri Booi. Para pemilik dusung sengaja membiarkan orang lain untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam dusung miliknya. Aktifitas ini termanifestasikan melalui ungkapan "buah pala yang telah jatuh di atas tanah menjadi milik semua orang sedangkan buah pala yang masih di atas pohon merupakan hak pemilik (tuang dusung)". Sekalipun buah pala (biji pala) memiliki nilai ekonomis yang tinggi, namun

petani pala Booi memilih untuk “saling berbagi” dengan orang lain. Perilaku “saling berbagi” ini hanya berlaku di antara sesama ana negeri Samahu Amalatu saja dan tidak melibatkan orang dari luar (orang dagang) komunitas. Fenomena ini memperlihatkan bahwa, dalam menjalankan aktifitas pemenuhan kebutuhan hidup terdapat rasa saling percaya, norma, nilai dan jaringan sebagai sesama ana negeri yang merupakan elemen pokok modal sosial sehingga dapat dikatakan juga bahwa tradisi memungut biji pala di dalam komunitas adat Negeri Booi sebagai modal sosial.

**Aset fisik**, Di *Negeri Booi* akses terhadap aset fisik tergambar pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang dapat memudahkan masyarakat untuk memasarkan hasil *dusung*-nya. Terkait peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur bagi masyarakat. Dwivedi & Hussain (2018) menyatakan bahwa, pemerintah memiliki tanggung jawab dan berperan dalam menyediakan fasilitas pendukung akan tetapi keberlanjutan fasilitas yang disediakan pemerintah tersebut merupakan tanggung jawab masyarakat. Dalam penuturan informan menjelaskan bahwa, mulanya tidak terdapat akses jalan masuk dan keluar ke negeri Booi sehingga setiap kali anggota komunitas ingin memasarkan hasil *dusung*, maka mereka harus memikul hasil *dusung* tersebut dan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Apalagi kondisi geografis Negeri Booi yang berada di atas gunung dan akses jalan masuk dan keluar Negeri Booi berupa trap-trap (anak tangga). Tentunya kondisi ini memiliki tantangan tersendiri bagi anggota komunitas Negeri Booi dalam beraktifitas.

**Aset keuangan**, Dalam rumah tangga selain berbagai aset yang disebutkan sebelumnya, aset keuangan merupakan aset dasar rumah tangga yang diperlukan untuk mencapai tujuan mata pencaharian (Giri, 2022). Aset keuangan ini lebih mengacu pada kepemilikan tabungan dan seberapa besar akses masyarakat terhadap sumber-sumber keuangan formal dan informal dalam bentuk pinjaman. Pandangan ini menyiratkan bahwa, aset keuangan mengandung dua faktor yang dapat menunjang mata pencaharian rumah tangga masyarakat pedesaan yaitu, kepemilikan tabungan dan akses terhadap pinjaman. Kondisi masyarakat pedesaan yang dekat dengan garis kemiskinan, cenderung diidentikan dengan kemiskinan akibat pendapatan yang rendah. Selain pendapatan terdapat juga berbagai faktor lainnya yang turut memaksa masyarakat pedesaan untuk memilih mengadopsi mata pencaharian yang lebih menguntungkan. Adapun tujuan utama dari perilaku tersebut adalah lebih cepat mendapatkan uang tunai.

Kepemilikan uang tunai dalam masyarakat pedesaan merupakan “jaminan” keberlangsungan hidup dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga. Selanjutnya terkait dengan akses terhadap pinjaman, masyarakat pedesaan lebih memiliki akses pinjaman melalui sektor informal, seperti meminjam dari keluarga terdekat. Sedangkan akses pinjaman dari sektor formal sangat sulit diperoleh masyarakat pedesaan. Dimana penyebabnya adalah terkait akses permodalan atau juga dapat berupa “jaminan” yang diminta pihak perbankan. Hal ini menunjukkan jika akses terhadap keuangan memainkan peran dalam upaya mencapai keberlanjutan ekonomi. dalam konteks komunitas adat Negeri Booi, akses keuangan berbeda sangat berbeda dengan pandangan keuangan yang berkembang secara global.

Akses keuangan lebih merujuk pada kepemilikan uang yang disimpan pada lembaga-lembaga keuangan. Bagi komunitas adat Negeri Booi akses terhadap aset keuangan tidaklah seperti demikian, namun akses terhadap sumber-sumber keuangan dapat berupa akumulasi dari aset alam maupun aset sosial. Dalam kehidupan ekonomi tradisional komunitas adat Negeri Booi, mereka memandang tanaman pala sebagai aset keuangan mereka. Dimana mereka memiliki kebebasan untuk memungut biji pala tanpa ada yang melarangnya sekalipun tanaman pala tersebut bukan milik pribadi atau keluarga besarnya. Dengan kata lain, aktifitas memungut biji pala yang telah jatuh di atas tanah telah menjadi jaminan melalui keberadaan tradisi *bapilih* bagi orang yang memiliki keterbatasan akses terhadap aset.

Sistem ekonomi tradisional yang dipertontonkan komunitas adat Negeri Booi memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi yang dimiliki masyarakat Jawa, seperti hubungan patron-klien atau “atasan-bawahan” namun lebih merujuk pada hubungan sebagai “mitra kerja”. Kesadaran ini dari generasi ke generasi dan masih terjaga hingga saat ini. Pandangan penulis, hubungan ini muncul akibat kompleksitas dari sistem pewarisan *dusung* yang lebih berfokus pada anak laki-laki berdasarkan garis keturunan ayah (patrilinialistik). Sistem pewarisan seperti ini menyebabkan kaum perempuan menjadi rentan kehilangan aset keuangan mereka berupa *dusung* dan tanaman pala. Kondisi inilah, maka muncul kesadaran sebagai sesama “anak negeri Samahu Amalatu” sehingga ada mekanisme untuk melindungi dan menjamin penghidupan bagi perempuan Negeri Booi.



## **Strategi mata pencaharian perempuan pesisir dalam mempertahankan keberlanjutan ekonomi rumah tangga**

Mata pencaharian bagi masyarakat pesisir dan pedesaan merupakan pekerjaan atau pencaharian utama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap masyarakat sudah barang tentu memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda setiap daerahnya. Hal ini dapat disebabkan oleh keadaan geografis, potensi sumber daya yang tersedia maupun kebiasaan-kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Aktifitas penghidupan yang selalu bergantung dengan alam menyebabkan pendapatannya menjadi tidak pasti. Akibatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga berupa sandang, pangan dan papan menjadi berkurang, sehingga rentan masuk ke dalam kelompok masyarakat miskin. Savitha (2020) dan Malik et al (2020) mengungkapkan bahwa, 70 persen orang miskin di dunia merupakan kaum perempuan, terutama perempuan pada negara-negara berkembang. Apalagi, keberadaan orang miskin tersebut justru banyak ditemukan pada daerah pedesaan. Meskipun, di lain sisi tidak dapat dipungkiri juga jika daerah pedesaan merupakan daerah yang dekat dengan sumber daya alam yang melimpah akan tetapi hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat desa terutama kaum perempuan dapat sejahtera (Francis, 2016; Hahury et al., 2020; Rodgers, 2018; Salisu et al., 2017)

Diperhadapkan dengan kondisi ini, maka masyarakat pesisir “dipaksa” untuk mencari atau menemukan alternatif sumber pendapatan yang lain. Kenyataan memberikan gambaran bahwa, tidak selamanya masyarakat yang tinggal dan bermukim pada daerah pesisir akan bermata pencaharian sebagai nelayan dengan sumber pendapatan hanya pada sektor perikanan semata akan tetapi juga bersumber dari sektor perkebunan. Lebih jauh, kompleksitas antara kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dengan potensi alam yang tersedia bukan hanya menjadi wilayah laki-laki akan tetapi kaum perempuan pun turut memainkan peran penting dan strategis dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Perempuan merupakan pihak yang memiliki pendapatan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki (Damayant, 2018; Karin & Myriam, 2016). Di Indonesia sendiri kesenjangan pendapatan antar laki-laki dan perempuan adalah sebesar 13,7 persen (Tijdens & Klaveren, 2012).

Keterlibatan perempuan di daerah pesisir sebagai sumber pendapatan alternatif rumah tangga terkait pemenuhan kebutuhan hidup tergambar melalui aktifitas produksi pada berbagai sektor serta aktifitas reproduksi, seperti yang diperlihatkan diagram berikut ini:

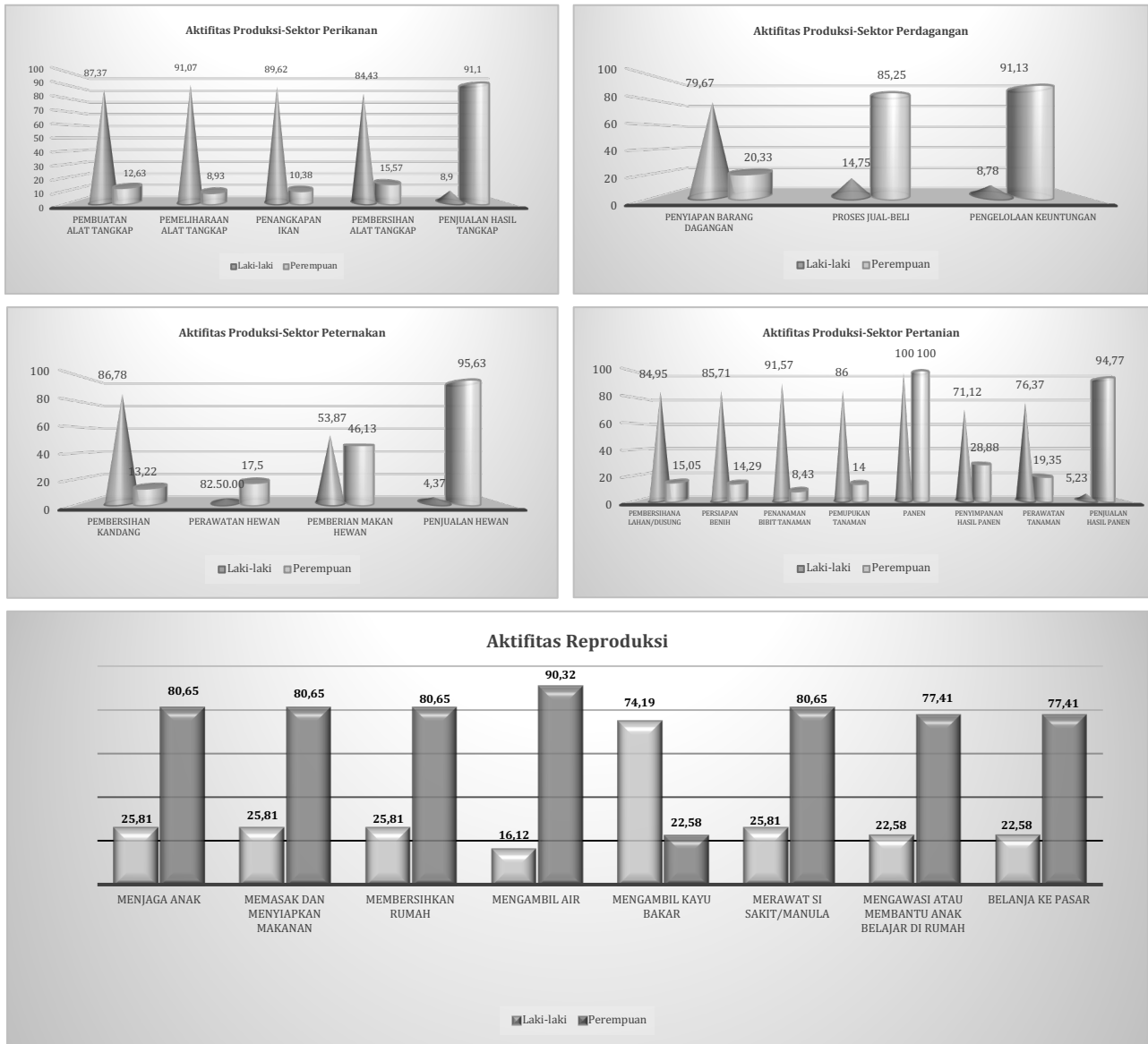


Diagram 1. Aktifitas Produksi dan Reproduksi

Aktifitas produksi yang dilakoni perempuan pesisir terdiri dari sektor perikanan, perdagangan, peternakan dan pertanian. Sektor-sektor produksi di atas memperlihatkan keterlibatan kaum perempuan dalam membantu laki-laki sebagai kepala rumah tangga untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Umumnya, aktifitas produksi pada semua sektor memiliki kesamaan di mana aktifitas produksi yang memerlukan kerja fisik lebih banyak dilakukan kaum laki-laki. Sementara kaum perempuan memiliki wilayah pada aktifitas produksi yang berhubungan dengan finansial. Kemudian, terkait aktifitas reproduksi dalam temuan empirik ini bukan saja tentang fertilitas semata akan tetapi juga mencakup 8 aktifitas (Sari & Margowati, 2016), yaitu aktifitas belanja ke pasar, mengawasi atau membantu anak, merawat orang sakit/manula, mengambil kayu bakar, mengambil air, membersihkan rumah, memasak dan menyiapkan makanan serta menjaga anak. Beragam aktifitas reproduksi tersebut secara tidak langsung menunjukkan wilayah domestik perempuan sehingga peran perempuan memang lebih dominan dibandingkan dengan peran laki-laki.

Strategi mata pencaharian yang diterapkan perempuan pada daerah pesisir yang masih menyentuh ranah domestik dalam pandangan penulis merupakan salah satu faktor penghambat kaum perempuan pesisir untuk berkembang. Ketergantungan perempuan pesisir terhadap kaum pria dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga pun masih cukup besar. Dengan kata lain, posisi ekonomi perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki. Sehingga perempuan didorong untuk memainkan peran dalam membantu laki-laki sebagai kepala keluarga agar kebutuhan hidupnya dapat terus berkelanjutan. Hal ini

mengisyaratkan bahwa, keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja didorong oleh pengaruh faktor keterdesakan/kesulitan ekonomi keluarga, tingkat pendidikan yang rendah, keahlian yang rendah maupun terbatasnya akses perempuan terhadap aset.

Keterbatasan laki-laki sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sekaligus peningkatan kebutuhan hidup yang cenderung beragam menyebabkan perempuan terlibat dalam upaya mencari tambahan pendapatan bagi rumah tangganya. Jenis-jenis mata pencaharian alternatif yang akan dikelola perempuan pesisir sangat bergantung pada struktur dan potensi sumber daya ekonomi lokal, baik yang tersedia di kawasan pesisir. Salah satu strategi mata pencaharian yang dilakukan perempuan pesisir adalah strategi mata pencaharian ganda. Nora (2003) menyatakan bahwa untuk peningkatan taraf hidup, maka masyarakat akan menambahkan jenis pekerjaan dan merubah pola mata pencaharian. Pola nafkah ganda, yang dilakukan perempuan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan pola tersebut perempuan dapat bertahan hidup bersama keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. kemudian, strategi penghidupan perempuan bukan saja pada sektor ekonomi, akan tetapi berorientasi pada sektor sosial dan kultural.

Dengan demikian, dapat dikatakan jika perempuan pesisir memiliki peran strategis dalam mengelola dan merencanakan keberlangsungan perekonomian keluarga karena berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan "operator" keluarga. Rumah tangga masyarakat pedesaan termasuk perempuan, umumnya melakukan beragam aktifitas untuk menjaga kelangsungan hidup, jarang yang hanya memiliki aktifitas ekonomi tunggal (Asiah et al., 2019). Mereka berusaha membentengi diri dari ketidakpastian melalui diversifikasi mata pencaharian. Walaupun demikian peran ganda perempuan pesisir ini tidak dibekali dengan pengetahuan, pola pikir dan perilaku hidup maju sehingga taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir pada umumnya relatif rendah.

## KESIMPULAN

Peningkatan kebutuhan hidup rumah tangga masyarakat pedesaan termasuk perempuan pesisir yang cenderung beragam menyebabkan kaum perempuan "dipaksa" masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Keterlibatan perempuan pesisir dalam mempertahankan keberlanjutan penghidupan rumah tangga dilakukan dalam keterbatasannya. Strategi yang digunakan adalah strategi mata pencaharian ganda, dimana perempuan bukan saja melakoni satu mata pencaharian sebagai sumber pendapatannya akan tetapi lebih dari satu mata pencaharian. strategi mata pencaharian ganda yang dilakukan perempuan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan pola tersebut perempuan dapat bertahan hidup bersama keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Walaupun demikian, hingga saat ini peran ganda perempuan pesisir dalam mempertahankan keberlanjutan penghidupan rumah tangganya masih terbatas akibat terbatasnya pengetahuan, ketrampilan, pola pikir maupun keterbatasan akses terhadap aset. Untuk itu keterlibatan berbagai pihak mutlak diperlukan dalam memberi penguatan bagi perempuan pesisir, seperti pelatihan untuk peningkatan ketrampilan perempuan pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almanshur Fauzan, G. D. (2012). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Anker Richard. (1998). *Gender And Jobs: Sex Segregation Of Occupations In The World*.
- Asiah Salatalohy, Muh.Dassir, S. M. (2019). Strategi dan Struktur Nafkah Rumah Tangga Petani Agroforestri Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. *Hutan Dan Masyarakat*, 11(2), 127-138. <https://doi.org/10.24259/jhm.v11i2.8297>
- Azis, A. L. dan H. O. (2021). Analisis Pendapatan Pedagang Pada Objek Wisata Di Pulau Ambon. *Cita Ekonomika: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 15(2), 56-61. <https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v15i2.4667>
- Baffoe, G., & Matsuda, H. (2018). An empirical assessment of rural livelihood assets from gender perspective: evidence from Ghana. *Sustainability Science*, 13(3), 815-828. <https://doi.org/10.1007/s11625-017-0483-8>
- Barbier, E. B. (2015). Climate change impacts on rural poverty in low-elevation coastal zones. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 165, A1-A13. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2015.05.035>
- Blythe, J. L. (2015). Resilience and social thresholds in small-scale fishing communities. *Sustainability Science*, 10(1), 157-165. <https://doi.org/10.1007/s11625-014-0253-9>

- Cai, Z. (2012). Livelihood capital analysis of farmers in poor villages of the wenchuan earthquake disaster area, China. *Chin. Rural Econ*, 12, 55–67.
- Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihood: Practical concepts for 21st century* (No. 296).
- Damanik, A. M., Zulhani, Z., & Rosmeli, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15–25. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4533>
- Damayant, M. H. L. & A. (2018). Kesenjangan Upah Antargender Di Indonesia: Bukti Empiris Di Sektor Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, Edisi Khusus*, 1–21. <https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/view/1096>
- Dehghani Pour, M., Barati, A. A., Azadi, H., & Scheffran, J. (2018). Revealing the role of livelihood assets in livelihood strategies: Towards enhancing conservation and livelihood development in the Hara Biosphere Reserve, Iran. *Ecological Indicators*, 94, 336–347. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.05.074>
- Dwivedi, S. K., & Hussain, M. S. (2018). Core responsibilities of government, local communities, state tourism authority for various drawbacks and lacks in facilities development, protection and conservation of sun temple at Konark. *International Journal of Innovative Knowledge Concepts*, 6(5), 69–77.
- Ellis, F. (1999). Rural Livelihood Diversity in Developing Countries: Evidence and Policy Implications. *Overseas Development Institute, London*, 40. <http://hdl.handle.net/10535/4486>
- F.M. Nugroho, S. Satmoko, K. (2018). Peran kelompok tani terhadap usahatani padi di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. *Agro Complex*, 2(2), 109–119. <https://doi.org/10.14710/joac.2.2.109-119>
- Field, J. (2010). *Modal Sosial* (Terjemahan). Bantul: Kreasi Wacana.
- Fischer, A. P. (2018). Pathways of adaptation to external stressors in coastal natural-resource-dependent communities: Implications for climate change. *World Development*, 108, 235–248. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.007>
- Francis O. C. Nwonwu. (2016). The Paradox Of Natural Resource Abundance And Widespread Underdevelopment In Africa. *Journal International Journal Of African Renaissance Studies - Multi-, Inter- And Transdisciplinarity*, 11(2), 52–69. <https://doi.org/10.1080/18186874.2016.1246512>.
- Frank Ellis. (2007). Household strategies and rural livelihood diversification. *The Journal of Development Studies*, 35(1), 1–38. <https://doi.org/DOI:10.1080/00220389808422553>
- Fröcklin, S., Jiddawi, N., & de la Torre-Castro, M. (2018). Small-scale innovations in coastal communities: shell-handicraft as a way to empower women and decrease poverty. *Ecology and Society*, 23. [https://www.jstor.org/stable/26799097?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/26799097?seq=1#metadata_info_tab_contents)
- Giri, Y. N. (2022). Relationship Between Livelihood Capitals and Livelihood Strategies of Dalit. *Contemporary Voice of Dalit*, 2455328X211060587. <https://doi.org/10.1177/2455328X211060587>
- Hahury, H. D., & Sospelisa, F. (2021). Strategi penghidupan rumah tangga pedesaan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 343–350. <https://doi.org/10.30653/002.202062.817>.
- Hahury, H. D., Prabawa, T. S., Wiloso, P. G., Soumokil, T., & Ndoen, M. L. (2020). Institutional impacts on choice of traditional agroforestry-based rural community livelihood strategies in maluku (Utilization of “Dusung” and Nutmeg in Booi Village, Maluku). *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 26(2). <https://doi.org/10.7226/JTFM.26.2.189>
- Ian Scoones. (2009). Livelihoods perspectives and rural development. *The Journal of Peasant Studies*, 36(1), 171–196. <https://doi.org/10.1080/03066150902820503>
- Jaiteh, V. F., Loneragan, N. R., & Warren, C. (2017). The end of shark finning? Impacts of declining catches and fin demand on coastal community livelihoods. *Marine Policy*, 82, 224–233. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.03.027>
- John W. Creswell. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode kualitatifm kuantitatif dan campuran* (Achamd Fawaid & Rianayati Pancasari (ed.); Edisi IV). Pustaka Pelajar.
- Kabir, M. S., Radović Marković, M., & Radulović, D. (2019). The Determinants of Income of Rural Women in Bangladesh. In *Sustainability* (Vol. 11, Issue 20). <https://doi.org/10.3390/su11205842>
- Kakerissa Ariviana L. & Hahury Hendri D. (2018). Pala Booi: Prospek Pengembangan Industri Rumah Tangga Berbasis Sum-berdaya Lokal. *Prosiding Seminar Nasional Archipelago Engineering (ALE)*, 122–128.



- Kanthen Pamungkas Sari, S. M. (2016). Analisis Harvard Pada Implementasi Program Kota Layak Anak. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 1. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v1i1i1.97>
- Karin Hoisl & Myriam Mariani. (2016). It's A Man's Job: Income And The Gender Gap In Industrial Research. *Management Science*, 63(3), 587–900. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2357>
- Kuang, F., Jin, J., He, R., Ning, J., & Wan, X. (2020). Farmers' livelihood risks, livelihood assets and adaptation strategies in Rugao City, China. *Journal of Environmental Management*, 264, 110463. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110463>
- Lawless, S., Cohen, P., McDougall, C., Orirana, G., Siota, F., & Doyle, K. (2019). Gender norms and relations: implications for agency in coastal livelihoods. *Maritime Studies*, 18(3), 347–358. <https://doi.org/10.1007/s40152-019-00147-0>
- Malik, Sana; Naeem, K. (2020). Impact of COVID-19 Pandemic on Women: Health, livelihoods & domestic violence. In *Sustainable Development Policy Institute*. <https://www.iassw-aiets.org/wp-content/uploads/2021/01/Covid19-impact-on-women.pdf>
- Mardiana. (2015). Kesenjangan Penghasilan Antar Gender Di Indonesia Tahun 2013 Dengan Metode Dekomposisi Blinder-Oaxaca. *Jurnal Aplikasi Statistika Dan Komputasi Statistik*, 7(1).
- Maryam Sangadji. (2012). *Dinamika Modal Sosial: Budaya Sasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Titah Surga, Yogyakarta.
- Monagail, M. Mac, Cornish, L., Morrison, L., Araújo, R., & Critchley, A. T. (2017). Sustainable harvesting of wild seaweed resources. *European Journal of Phycology*, 52(4), 371–390. <https://doi.org/10.1080/09670262.2017.1365273>
- Muhammad Bugis, Hahury. D. H. (2022). The Diversification Of Coastal Women's Livelihoods As A Way Out Of Poverty: The Experience of Indigenous Community of Negeri Booi, Central Maluku. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 6641–6654. <https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/3900/2569>
- Nora Susilowati. (2003). Sosiologi Pedesaan. In *Sosiologi Pedesaan*. Universitas Negeri Padang.
- Paudel Khatiwada, S.; Deng, W.; Paudel, B.; Khatiwada, J.R.; Zhang, J.; Su, Y. (2017). Household Livelihood Strategies and Implication for Poverty Reduction in Rural Areas of Central Nepal. *Sustainability*, 9, 612. *Sustainability*, 9(4), 612. <https://www.mdpi.com/2071-1050/9/4/612>
- Pomeroy, R., Ferrer, A. J., & Pedrajas, J. (2017). An analysis of livelihood projects and programs for fishing communities in the Philippines. *Marine Policy*, 81, 250–255. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.04.008>
- Rodgers Lubilo. (2018). *Enactment Of 'Community' In Community Based Natural Resources Management In Zambezi Region, Namibia*. Wageningen University.
- Roy, A., & Basu, S. (2020). Determinants of Livelihood Diversification Under Environmental Change in Coastal Community of Bangladesh. *Asia-Pacific Journal of Rural Development*, 30(1–2), 7–26. <https://doi.org/10.1177/1018529120946159>
- Rusy dan Fathy. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>
- S. Savitha. (2020). Socio-Economic Conditions of Tribal Women in Villupuram District. *International Conference on Impact of Corona Virus on Asia Pacific Economies (Corona 2020)*, 26–29. <http://www.ijtrd.com/papers/IJTRD22111.pdf>
- Salisu Ojonemi Paul And Adejumo Ajibola Ojo. (2017). Poverty Alleviation Policy Debate: Keke Napep, Agricultural Development And Economic Diversification In Nigeria. *International Journal Of Development And Sustainability*, 6(9), 1066–1085.
- Sarmin Akther, Sankar Gobinda Saha, A. H. and M. N. I. (2017). Livelihood Strategies of Riverine Fishing Communities of the River Padma near Rajshahi City Corporation. *International Journal of Fisheries and Aquatic Studies*, 5(2), 195–199. <https://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4271>
- Sharaunga, S., & Mudhara, M. (2021). Analysis of Livelihood Strategies for Reducing Poverty Among Rural Women's Households: A Case Study of KwaZulu-Natal, South Africa. *Journal of International Development*, 33(1), 127–150. <https://doi.org/10.1002/jid.3516>
- Silingiene, V., & Radvila, G. (2014). Gender Differences Of Wage Trends In The Baltic States. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 156, 98–101.
- Singgalen, Y. A., Sasongko, G., & Wiloso, P. G. (2019). Ritual Capital for Rural Livelihood and Sustainable Tourism Development in Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 25(2), 115. <https://doi.org/10.7226/jtfm.25.2.115>
- Syahra Rusydi. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1), 1–22.

- 
- Tijdens, K. G. & M. V. K. (2012). *Frozen In Time: Gender Pay Gap Unchanged For 10 Years*.  
[https://www.researchgate.net/publication/242402083\\_Frozen\\_in\\_time\\_Gender\\_pay\\_gap\\_unchanged\\_for\\_10\\_years](https://www.researchgate.net/publication/242402083_Frozen_in_time_Gender_pay_gap_unchanged_for_10_years)
- Wang, F., Yang, D., Wang, C., & Zhang, X. (2015). The Effect of Payments for Ecosystem Services Programs on the Relationship of Livelihood Capital and Livelihood Strategy among Rural Communities in Northwestern China. *Sustainability*, 7(7), 9628–9648. <https://doi.org/10.3390/su7079628>
- Yuying Tong, Binbin Shu, M. P. (2018). Migration, Livelihood Strategies, and Agricultural Outcomes: A Gender Study in Rural China. *Rural Sociology*, 0(0), 1–31.